KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR segera tuntaskan revisi prioritas prolegnas 2015
Tanggal : Jumat, 10 Juli 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

DPR Segera Tuntaskan Revisi Prioritas Prolegnas 2015

Dok. DPR

Ketua DPR RI Setya Novanto saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajak pemerintah untuk lebih serius dan berkonsentrasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, terutama dalam penyelesaian prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Karena sampai saat ini masih ada beberapa tunggakan rancangan undang-undang (RUU) yang belum diselesaikan sementara waktu yang tersisa semakin sedikit.

Berangkat dari kenyataan tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengajak pemerintah bahu membahu menuntaskan persoalan tersebut. ''Ada beberapa RUU yang belum terselesaikan, dan ini butuh konsentrasi,'' katanya pada rapat paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2014 – 2015.

Novanto mengungkapkan, DPR telah melaksanakan fungsi legislasi antara lain melakukan revisi terhadap Prioritas Prolegnas Tahun 2015 yaitu menambah RUU tentang KPK, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan. Selain itu juga mengganti RUU tentang Ketahanan Pangan dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta mengganti RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan RUU tentang Bea Materai.

DPR masih kata Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, juga telah menyetujui tiga rancangan undang - undang yaitu RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Penjaminan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Selain itu, ada enam RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi yakni RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Politisi Golkar dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur ini mengemukakan, ada empat RUU usul Pemerintah, yaitu RUU tentang Merek, RUU tentang KUHP, RUU tentang Paten, dan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. ''Saat ini sudah ditetapkan alat kelengkapan DPR yang akan melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah,'' ungkapnya.

Novanto menambahkan, DPR terus berupaya menyelesaikan penyusunan beberapa RUU yang menjadi prioritas tahun 2015. Berbagai upaya dilakukan baik melalui Rapat Kerja, RDP, dan RDPU. ''Anggota DPR aktif melakukan kunjungan kerja untuk memperoleh masukan dari masyarakat (*stakeholder*) dalam rangka membentuk undang-undang yang adaptif, responsif, dan aspiratif bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,'' jelasnya.

Representasi rakyat

Sementara di bidang fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dua siklus APBN, yaitu pertama, pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2016 yang membahas pokok - pokok kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi makro. Kedua, pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2015 sebagai wujud pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun berjalan.

Novanto menambahkan, dalam melaksanakan amanat UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mewujudkan representasi rakyat untuk memperjuangkan daerah pemilihan, DPR telah menetapkan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Usulan program dapat berasal dari inisiatif Anggota DPR, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

''Pimpinan DPR mengharapkan Pemerintah dapat sepakat untuk mengakomodir usulan program yang sudah diinisiasi oleh DPR berdasarkan kebutuhan masyarakat,'' paparnya.

Selain persoalan yang terkait dengan fungsi legislasi, DPR juga menyoroti berbagai persoalan mulai dari erupsi Gunung Sinabung, kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat sampai dengan kelancaran dan kenyamanan arus mudik. Untuk Erupsi Sinabung, Novanto meminta agar penanganan bencana tersebut di tangani pemerintah pusat dan dipimpin seorang menteri koordinator.

''Pimpinan DPR sudah mengecek ke pasar tradisional dan memang pemerintah harus turun mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Untuk arus mudik, kita meminta pemerintah bisa memberikan jaminan kepada masyarakat.''

Bidang fungsi pengawasan, lanjut dia, DPR sudah menyetujui calon panglima, calon hakim agung, calon duta besar dan pertimbangan atas calon kepala BIN. Selanjutnya DPR akan melaksanakan reses sampai tanggal 13 Agustus 2015, sehari kemudian baru dibuka masa sidang berikutnya. ● ril.